

BAB I

PENDAHULUAN

Bab I Membahas tentang pendahuluan yang mendeskripsikan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan struktur organisasi tesis.

A. Latar Belakang Masalah

Kekuatan *civil society* di era reformasi saat ini patut diragukan. Tokoh-tokoh penggerak *civil society* sejak era reformasi dirintis hingga sekarang terjebak dalam kehidupan *hard politics*, yaitu aktivitas politik praktis yang merebut kekuasaan formal pemerintahan melalui mekanisme pemilu atau gerakan yang bersifat kepartaian (Argenti, 2017:84). Padahal, sebagai gerakan *civil society* sepatutnya untuk memainkan peran sebagai *soft politics*, yaitu aktivitas politik dalam kerangka gerakan moral yang tidak berkepentingan merebut kekuasaan formal pemerintahan, tetapi hanya mempengaruhi kekuasaan dari luar struktur pemerintahan.

Banyak faktor yang menyebabkan melemahnya *civil society* dan terpolarisasinya gerakan reformasi di Indonesia. Gerakan *civil society* Indonesia di era reformasi lebih menunjukkan kelemahannya daripada kekuatannya. *Civil society* yang semula otonom terkooptasi kepada negara ketika intelektualnya dalam kekuasaan. Intelektual *civil society* sendiri justru memperlihatkan sikap inkonsistensi antara nilai dan aksi. Lebih jauh, *civil society* telah menjadi sarana *struggle for power* dan ketika *power* diraih terjadi kooptasi *civil society* terhadap negara. Dalam lingkup yang lebih luas, telah terjadi hilangnya keadaban publik dan munculnya primordialisme baru, seperti nasionalisme etnis, komunalisme, dan sektarianisme agama.

Intelektual-intelektual sipil lain pada umumnya terpecah-pecah, tidak mampu mengonsolidasikan komunitas *ashabiyah* mereka untuk membangun kekuatan bersama sebagai kekuatan *civil society* dalam memperjuangkan isu-isu demokrasi, seperti advokasi hak-hak asasi manusia, pluralisme, penegakan keadilan, demokrasi, pembelaan terhadap kaum *dhu'afa* dan *mustadh'afin*, pengakuan atas pluralitas atau kemajemukan bangsa, toleransi dan mengembangkan *good governance*. Mereka justru lebih tertarik untuk terjun dalam politik praktis guna memainkan peran konkrit dalam reformasi. Namun sayang, mereka juga tidak

mampu menghindari proses politik yang manipulatif dan destruktif. Kondisi ini membuat kepemimpinan menjadi vakum di kalangan *civil society* dan organisasi kemasyarakatan.

Gerakan *civil society* Indonesia di era reformasi lebih bersifat sporadis, sehingga lebih menunjukkan kelemahannya daripada kekuatannya. Karena itu, dibutuhkan agenda *high politics* untuk memberdayakannya. Strategi yang relevan untuk diambil dalam rangka memperkuat basis *civil society* adalah transformasi gerakan dan pemikiran politik intelektual Muhammadiyah sebagai kekuatan *soft politics*. Dalam kondisi di mana negara sangat kuat dan melemahnya *civil society*, sebagaimana yang terjadi di era reformasi sekarang, *civil society* membutuhkan transformasi pemikiran yang mencerahkan agar peranan *civil society* dapat dimainkan dalam ruang publik (Santoso, 2013:237). Kondisi *civil society* yang telah disebutkan di atas diperburuk oleh hilangnya keadaban publik yang diindikasikan dengan fenomena-fenomena ekstrim, seperti meningkatnya korupsi, kerusuhan, dan gaya hidup yang berorientasi materialisme hedonistik. Menurut Santoso (2013:238) lemahnya *civil society* disebabkan:

“Pada era reformasi, ruang keterbukaan dan kebebasan *civil society* justru telah berkembang secara anomali yang mengabaikan *civic values* (nilai-nilai kewargaan), seperti keterbukaan pikiran, kepercayaan bersama antar kelompok masyarakat, penghargaan pada perbedaan, sikap dan aksi anti-kekerasan, serta solidaritas”

Konsep *civil society* dalam perkembangan kontemporer menjadi kebutuhan yang mendesak bagi proses pembangunan demokratisasi, terlebih di era desentralisasi politik saat ini, dimana masyarakat diberikan ruang partisipasi selebar-lebarnya untuk turut serta dalam proses pembangunan demokrasi. Demokratisasi di suatu negara akan berjalan dengan baik, apabila ruang partisipasi politik masyarakat melalui wadah *civil society* terbuka dengan lebar. Lemahnya *civil society* dalam ruang kewarganegaraan demokrasi di Indonesia, dapat dijumpai dengan cara memeriksa unsur bijak dalam kebijakan publik. Kebijakan publik yang diadil oleh pemerintah kerap mendapat penolakan dari warga negara. Penolakan tersebut tidak mendapat respons positif dari pemerintah untuk menanggapi aspirasi yang muncul dari bawah. Hal itu disebabkan oleh cara pandang pemerintah terhadap warga negara sebagai obyek dari kebijakan publik. Transparansi anggaran

masih bersifat rahasia dan tertutup dari ruang publik. Dengan demikian, penguatan *civil society* dalam arus demokrasi harus disadari menjadi kebutuhan mutlak bagi terselenggaranya pemerintahan yang demokratis konstitusional.

Ada sejumlah alasan yang mendasari mengapa penelitian ini menarik untuk dilakukan. *Pertama*, secara tidak langsung, transformasi pemikiran politik intelektual Muhammadiyah era reformasi dapat memberi pengaruh dalam penguatan *civil society* di Indonesia ditengah terpolarisasinya gerakan reformasi dan kebebasan demokrasi yang kebablasan. *Kedua*, *Civil society* di Indonesia belum memiliki kekuatan politik untuk berhubungan langsung dengan kekuasaan negara. *Ketiga*, masyarakat akar rumput (*grassroot*), kurang mendapatkan perhatian yang serius dalam mengembangkan konsep kewarganegaraan demokrasi. *Keempat*, pemberdayaan *civil society* dari pemerintah kurang efektif dalam mewujudkan integrasi sosial kewarganegaraan. *Kelima*, Muhammadiyah merupakan sebuah organisasi yang besar maka harus dikelola sumber dayanya, jaringannya dan organisasinya dengan baik, sehingga mampu menjawab berbagai permasalahan yang hadir ditengah masyarakat. *Keenam*, Muhammadiyah ingin menguatkan basis ekonomi supaya lebih mandiri dengan memberdayakan lingkungan terdekatnya. *Ketujuh*, penelitian sebelumnya tentang *Civil Society* dan Politik Moral Muhammadiyah hanya mengkaji tentang peran Muhammadiyah dalam penyeimbangan pemerintah pasca reformasi sehingga belum sepenuhnya menjawab mengapa persoalan *civil society* di Indonesia itu lemah (Gili, 2017). *Kedelapan*, belum adanya penelitian yang mengkaji tentang transformasi pemikiran politik Intelektual Muhammadiyah era reformasi dalam penguatan *civil society*.

Dari alasan tersebut dapat diketahui bahwa diperlukan pemikiran *soft politics* yang ditawarkan untuk menjadi solusi bagi kondisi *civil society* era reformasi yang telah menjadi sarana *struggle for power* (perjuangan untuk meraih kekuasaan) dan kehilangan keadaban publiknya, termasuk inkonsistensi intelektual *civil society* antara nilai dan aksi. Oleh karena itu, penelitian ini mengarahkan pembaca untuk memahami tentang transformasi pemikiran politik intelektual Muhammadiyah era reformasi dalam penguatan *civil society* di Indonesia.

Namun begitu, masyarakat sipil pada dasarnya merupakan kolektivitas organisasi-organisasi non-negera, kelompok-kelompok kepentingan, asosiasi-

asosiasi, seperti: asosiasi profesi, serikat pekerja, pelajar sekolah lanjutan dan mahasiswa perguruan tinggi, kelompok perempuan, arus intelektual, media dan badan-badan keagamaan yang terkooptasi dalam satu gerakan aksi untuk terus melakukan pengawasan terhadap kekuasaan negara. Karena itu, *civil society* haruslah bersifat mandiri seperti yang dijelaskan Argenti (2017:90) sebagai berikut:

Masyarakat sipil haruslah memiliki sifat kemandirian serta kematangan politik, supaya masyarakat tidak mudah ditundukan oleh negara. Kemandirian di sini maksudnya mandiri dari finansial, fasilitas dan kegiatan. Dengan kapasitas kemandirian yang tinggi tersebut, kekuatan *civil society* akan mampu menjadi kekuatan penyeimbang (*balancing force*) dari kecenderungan intervensionis negara.

Civil society idealnya tidak menggantungkan diri pada pemerintah, bersifat mandiri terutama dalam dukungan finansial dan sarana prasarana. Namun dalam perjalanannya, intelektual *civil society* sebagai lokomotif gerakan sosial terjebak dalam ruang politik praktis diakibatkan kerosaknya nilai luhur moral sosial sebagai basis epistemologi gerakan *high politics*. Cara yang dapat dilakukan dalam menguatkan *civil society* di Indonesia, antara lain sebagai berikut: *Pertama*, menumbuhkan kesadaran dan pemahaman kewarganegaraan demokrasi di kalangan masyarakat melalui pemberdayaan *civil society*, pemberdayaan lembaga swadaya masyarakat, paguyuban, untuk mengawasi pemerintahan yang demokratis dalam merumuskan kebijakan publik. *Kedua*, melakukan revitalisasi pengetahuan birokrasi tentang konsep pelayanan publik sebagai pembantu negara bukan sebaliknya, penguasa bagi warga negara. *Ketiga*, negara harus memberi ruang demokratis bagi warga negara untuk melakukan akses informasi, kontrol dan partisipasi dalam merumuskan kebijakan publik.

Dalam konteks reformasi, ketika bangsa Indonesia dihadapkan dengan pelbagai bentuk dekadensi moral, kesenjangan sosio-politik dan ekonomi dalam ruang publik terutama yang berkenaan dengan ketidakadilan, korupsi, kekerasan, kerusakan lingkungan dan kemiskinan yang sangat mengkhawatirkan bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, transformasi pemikiran politik intelektual Muhammadiyah, sangat berpengaruh dalam membangun keseimbangan yang baru bagi terbentuknya proses gerakan reformasi dan penguatan *civil society*. Muhammadiyah melalui peran tokoh intelektualnya bersama dengan kekuatan lain yang termasuk bagian dari kekuatan reformasi ikut bertanggung jawab dalam

mengawal jalannya reformasi secara sistematis agar tidak bermuara pada *cheos* kemanusiaan.

Keterlibatan Muhammadiyah dalam politik di tengah melemahnya kekuatan *civil society* Indonesia di era reformasi, memberikan arah bagi perjalanan politik bangsa Indonesia menuju kehidupan politik yang berkeadaban, melalui netralitas politik yang ditandai dengan politik alokasif Muhammadiyah, yaitu politik untuk mendistribusikan nilai luhur moral ke dalam proses politik sebagai bagian dari dakwa *amar ma'ruf nahi munkar*, yakni usaha untuk mengajak manusia kepada jalan yang benar dan meninggalkan kemungkaran (Nashir, 2006:125-130).

Muhammadiyah mengambil posisi dan peran sebagai *the power of politik* atau *moral forces*, yang memainkan peran sebagai *interest groups* atau sebagai *pressure groups* yang lebih efektif dalam melakukan transformasi pemikiran politik dalam penguatan *civil society* di Indonesia. Dalam memainkan peran sebagai *interest groups*, Muhammadiyah berusaha mempengaruhi kebijakan pemerintahan dengan memainkan fungsi sebagai *pressure groups* yaitu dengan memberikan kontrol politik, memainkan *publik opinion*, mempengaruhi pengambilan kebijakan politik, memberikan budaya politik, melakukan *lobby* membangun komunikasi dan hubungan personal, menyampaikan protes dan demonstrasi. Hal tersebut dilakukan dalam rangka memperkuat basis *civil society* di Indonesia, yang didasari pada logosentrisme Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah sebagai berikut:

- a) Membina dan menggerakkan angkatan muda sehingga menjadi manusia muslim yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa.
- b) Membimbing masyarakat ke arah perbaikan kehidupan dan mengembangkan ekonomi sesuai dengan ajaran Islam.
- c) Memelihara, melestarikan, dan memberdayakan kekayaan alam untuk kesejahteraan masyarakat.
- d) Membina dan memberdaya petani, nelayan, pedagang kecil dan buruh untuk meningkatkan taraf hidupnya.
- e) Menggerakkan dan menghidup-suburkan amal tolong menolong dalam kebajikan, dan taqwah dalam bidang kesehatan, sosial, pengembangan masyarakat dan keluarga sejahtera.

Dengan demikian, agenda strategis Muhammadiyah dalam melakukan transformasi pemikiran politik untuk memperkuat *civil society* di Indonesia antara lain: *Pertama*, Muhammadiyah sebagai kelompok kepentingan yang memainkan peran dan fungsi sebagai kelompok kepentingan yang non politik-praktis seperti transformasi kelas menengah, penguatan integrasi sosial kewarganegaraan dan peningkatan kualitas hidup warga negara. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk kekuatan politik masyarakat yang memberikan sumbangan berharga bagi terbentuknya sistem demokrasi dan pencerahan politik nasional. *Kedua*, menyusun agenda politik. Bagi Muhammadiyah, keterlibatan dalam agenda pendidikan politik merupakan agenda yang tidak bisa dipisahkan dari perjuangan memperkuat posisi *civil society* seperti mewujudkan Indonesia berkemajuan melalui pemberdayaan *civil society*, membela kedaulatan negara dan pembengan nilai-nilai keadaban untuk Indonesia berkemajuan. yang merupakan cita-cita Muhammadiyah dalam mewujudkan masyarakat madani.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penelitian ini berakar dari sebuah masalah yaitu melemahnya kekuatan *civil society* dan terpolarisasinya gerakan reformasi. Didasari oleh apa yang telah dikemukakan tersebut maka penulis tertarik melakukan penelitian PKn dengan judul “**Transformasi Pemikiran Politik Intelektual Muhammadiyah Era Reformasi Dalam Penguatan *Civil Society* di Indonesia**”.

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas, yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah pemikiran politik intelektual Muhammadiyah era reformasi dalam penguatan *civil society* di Indonesia. Agar penelitian ini lebih terarah maka masalah pokok penelitian, dijabarkan dalam beberapa sub masalah yang dijadikan pertanyaan pokok penelitian. Sub masalah dan pertanyaan tersebut, peneliti rumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran pemikiran politik intelektual muhammadiyah era reformasi dalam penguatan *civil society* menuju indonesia berkemajuan?
2. Bagaimana peran pemikiran politik intelektual Muhammadiyah dalam mewujudkan kewarganegaraan demokrasi melalui penguatan *civil society* menuju indonesia berkemajuan?

3. Bagaimana kontribusi pemikiran politik intelektual muhammadiyah sebagai organisasi sosial kemasyarakatan dalam memperkuat *civil society* dari perspektif keilmuan pendidikan kewarganegaraan?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian tesis ini secara umum bertujuan untuk merekonstruksi dan memosisikan pemikiran politik intelektual Muhammadiyah era reformasi dalam penguatan *civil society* di Indonesia dalam kerangka pengembangan keilmuan bidang politik kewarganegaraan, dalam rangka pengembangan *civic virtue* bagi warga negara dan pengembangan kewarganegaraan yang baik dan cerdas (*good and smart citizen*)

Adapun secara khusus, penelitian tesis ini bertujuan untuk mendeskripsikan menganalisis dan memformulasikan corak pemikiran politik intelektual Muhammadiyah dengan aspek-aspek sebagai berikut:

1. Memperoleh informasi empirik tentang peran pemikiran politik intelektual muhammadiyah era reformasi dalam penguatan *civil society* menuju indonesia berkemajuan
2. Memperoleh informasi empirik tentang peran pemikiran politik intelektual Muhammadiyah dalam mewujudkan kewarganegaraan demokrasi melalui penguatan *civil society* menuju indonesia berkemajuan
3. Mendeskripsikan kontribusi pemikiran politik intelektual muhammadiyah sebagai organisasi sosial kemasyarakatan dalam memperkuat *civil society* dari perspektif keilmuan pendidikan kewarganegaraan

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari hasil penelitian tesis ini secara akademik berkontribusi terhadap khasana keilmuan pendidikan kewarganegaraan sebagai bidang ilmu interdisipliner, khususnya dalam topik kajian pengembangan pemikiran politik sebagai salah satu bidang kajian keilmuan PKn. Selain itu secara praksis juga memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan model pendidikan kewarganegaraan dalam kerangka pendidikan politik dan pengembangan keilmuan kewarganegaraan di Indonesia. Dengan demikian, gagasan tentang pemikiran politik intelektual Muhammadiyah dapat dijadikan sebagai salah satu bidang kajian utama dalam Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan. Baik jenjang sarjana,

magister dan doktor. Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan landasan pemikiran teoritis dalam rangka penguatan *civil society* di Indonesia, yaitu:

Secara praksis, penelitian ini bermanfaat bagi para akademisi PKn dalam mengembangkan bahan kajian pendidikan kewarganegaraan dalam menyelenggarakan pendidikan yang berbasis pada konstruksi sosio-religius keindonesiaan. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan *best practices* bagi generasi selanjutnya dalam memperkuat demokrasi, HAM dan *civil society* di Indonesia.

E. Struktur Organisasi Tesis

Struktur organisasi penulisan tesis ini berisi rincian tentang urutan penelitian dari setiap bab dan bagian demi bagian dalam tesis. Sistematika di dalam penyusunan tesis ini terdiri dari lima bab yang akan dirinci sebagai berikut: BAB I: Pendahuluan. Bab ini merupakan bagian awal dari tesis yang berisi lima bagian, yaitu latar belakang masalah, identifikasi dan perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan struktur organisasi tesis. BAB II Kajian Pustaka. Bab III berisi tentang konsep-konsep, teori-teori yang berkaitan dengan Konsep transformasi, pengertian politik, Transformasi pemikiran politik, Konsep Intelektual, Intelektual dan Muhammadiyah: Reinterpretasi, pengertian reformasi, pengertian *civil society*, pengertian negara Indonesia, dan Kajian ilmu politik dalam pendidikan kewarganegaraan. BAB III Metodologi Penelitian. Pada bab ini dijabarkan mengenai Desain Penelitian, Partisipan dan Tempat Penelitian, Sumber Data, Verifikasi Data dan Teknik Analisa Data dan Isu Etik. BAB IV Temuan dan Pembahasan. Pada bab ini dijabarkan mengenai peran pemikiran politik intelektual muhammadiyah era reformasi dalam penguatan *civil society* menuju indonesia berkemajuan, pemikiran politik intelektual Muhammadiyah dalam mewujudkan kewarganegaraan demokrasi melalui penguatan *civil society* menuju indonesia berkemajuan, kontribusi pemikiran politik intelektual muhammadiyah sebagai organisasi sosial kemasyarakatan dalam memperkuat *civil society* dari perspektif keilmuan pendidikan kewarganegaraan. BAB V Simpulan, Implikasi dan Rekomendasi. Pada bab ini dijabarkan mengenai simpulan, implikasi dan rekomendasi.